

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses implementasi (kesuksesan) Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi sebuah fenomena publik saat ini. Argumentasi yang mendukung penetapan isu-isu sentral ini adalah bahwa proses sentralisasi menjadi desentralisasi dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia sangat bergantung pada perubahan perilaku orang yang terlibat dalam proses tersebut, khususnya yang mengimplementasikan perubahan paradigma Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan paradigma ini, mengharuskan adanya perubahan cara berfikir, berkeyakinan dan bertindak menyangkut proses implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menyangkut kegiatan pelayanan publik secara umum.

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah yang terjadi secara bersamaan, baik sosial, dan politik di berbagai daerah. Permasalahan tersebut antara lain meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi dan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, menurunnya pelayanan prasarana dan sarana umum akibat mengecilnya penerimaan pemerintah daerah termasuk PAD, menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menurunnya ketentraman masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat (Mansyur, 2004). Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut diantaranya adalah dengan menganalisa sistem keuangan daerah termasuk didalamnya sistem penganggarannya (*budgetary*)

Menurut Nordiawan (2006), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi penting anggaran.

Secara operasional, asas umum dan pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran daerah dituangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diperbaharui dengan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengelolaan administrasi keuangan daerah yang cukup baik. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri semenjak tahun anggaran 2007 telah menerapkan anggaran dengan pendekatan kinerja. Di dalam proses penyusunan anggarannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri secara

operasional mendasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007. Proses penyusunan anggaran merupakan suatu proses krusial, dimana dalam proses tersebut menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana bagi tiap-tiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk satu tahun yang akan datang. Karena proses penyusunan anggaran merupakan proses yang krusial, maka proses tersebut seharusnya selalu dilakukan evaluasi sehingga kedepannya akan semakin baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Wonogiri bahwa anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju.

Penelitian Haryani (2010) menyebutkan bahwa di Kabupaten Batang ada beberapa kesulitan pemahaman dan pengimplementasian oleh aparat pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai peraturan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal-hal tertentu kemungkinan besar, aparat ini kemudian ‘menggampangkan’ peraturan tersebut, hingga faktor atau variabel kemudahan ini menjadi tidak signifikan dalam meningkatkan penggunaan dan kinerja aparat pemerintah daerah. Sementara Andrianto (2011) pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang cukup baik.

Pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pendekatan kinerja dalam perencanaan dan

penganggaran daerah dituangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diperbaharui dengan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabuten Wonogiri”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah kebingungan aparat pemerintah berpengaruh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah kemudahan penggunaan aturan berpengaruh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri?

4. Apakah kegunaan aturan berpengaruh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebingungan aparat pemerintah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.
4. Untuk menganalisis pengaruh kegunaanaturan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan penyusunan dan pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada didalam proses operasional.

### 2. Manfaat Teoritis

Sebagai pemikiran dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu lebih lanjut tentang penyusunan dan pengelolaan Keuangan Daerah dalam hubungannya dengan pelaksanaan Sistem Akuntan Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tetapi yang terpenting bagi penulis adalah penulis dapat mengimplementasikan apa yang telah penulis dapat dari perguruan tinggi ini, dan salah satunya adalah tercapainya skripsi ini.

## **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian skripsi ini akan dibagi dalam lima bab denganperincian sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah, sikap, kebingungan, kemudahan penggunaan aturan, kegunaan aturan, kerangka pemikiran, hipotesis, dan tinjauan penelitian terdahulu.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang sebaran data penelitian, karakteristik responden penelitian, pengujian instrumen penelitian, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran.